

# **PENERAPAN PIDANA PENGGANTI DENDA BERUPA PENYITAAN HARTA TERPIDANA DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN**

**Iwan Yuhandri**

## **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pidana pengganti denda berupa penyitaan harta terpidana dan pidana kurungan pengganti denda dalam tindak pidana di bidang perpajakan serta untuk mengetahui bagaimana seharusnya penerapan pidana pengganti denda berupa penyitaan harta terpidana dalam tindak pidana di bidang perpajakan yang belum diatur pada Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Hal ini menimbulkan pendapat yang berbeda di kalangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), menggunakan bahan hukum primer, dengan pengumpulan data secara studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hakim dalam menjatuhkan pidana pengganti denda dalam tindak pidana di bidang perpajakan terdapat dua pendapat yang berbeda di dalam putusan pengadilan, yaitu: *Pertama*, putusan yang langsung mensubsidairkan penyitaan harta benda terpidana jika terpidana tidak membayar denda; *Kedua*, langsung mensubsidairkan kurungan pengganti denda jika terpidana tidak membayar denda, tanpa menyita harta benda terpidana. Pidana kurungan pengganti denda mengacu pada Pasal 30 dan Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

**Kata Kunci:** Denda, Penyitaan, Terpidana, Pidana, Perpajakan

# **APPLICATION OF CRIMINAL SUBSTITUTION FINES IN THE FORM OF CONFISCATION OF THE CONVICTED'S ASSETS IN TAXATION CRIMES**

**Iwan Yuhandri**

## **Abstract**

This research was conducted to find out the application of criminal penalties in the form of confiscation of the convict's property and imprisonment in lieu of fines in criminal acts in the taxation sector and to find out how the application of criminal penalties in lieu of fines in the form of confiscation of the convict's assets in criminal acts in the field of taxation that has not been regulated in law General Provisions on Tax Procedures (UU KUP). This gives rise to different opinions among judges in making their decisions, giving rise to legal uncertainty. The method used in this paper uses normative legal research, with a statute approach and a case approach, using primary legal materials, with data collection by library research, then analyzed using qualitative methods. Judges in imposing a fine in lieu of a fine in a tax crime, there are two different opinions in the court's decision, namely: *First*, a decision that directly subsidizes the confiscation of the convict's property if the convict does not pay the fine; *Second*, immediately subsidize confinement in lieu of fines if the convict does not pay the fine, without confiscating the convict's property. Imprisonment in lieu of a fine refers to Article 30 and Article 31 of the Criminal Code (KUHP).

**Keywords:** Fine, Confiscation, Convicted's, Crime, Taxation